

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya, sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan jenis ini tidak boleh membuat orang terpuruk karena lingkup kemiskinan tidak hanya ekonomi tetapi juga sosial dan politik. Hubungan sosial yang baik mendukung peluang seseorang untuk meningkatkan atau bahkan memiliki keterampilan sehingga meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini dikarenakan angka kemiskinan masih tinggi. (Linton et al, 2020)

Kemiskinan merupakan masalah ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemiskinan juga merupakan situasi absolut atau relatif. Oleh karena itu, ketika masyarakat, budaya, atau kapasitas struktural meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Amin et al, 2022)

Selain itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi karena terkait dengan kurangnya akses ekonomi, sosial, budaya, politik, dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar pendapatan atau tingkat konsumsi seseorang yang berada di bawah standar kesejahteraan yang terukur (seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan).

Namun, kemiskinan memiliki makna yang lebih dalam karena berkaitan dengan ketidakmampuan dalam mencapai aspek di luar pendapatan (faktor non pendapatan) seperti akses terhadap kebutuhan dasar kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. (Rinaldi, 2022)

Dalam hal ini sebelum Program Keluarga Harapan diberikan kepada masyarakat miskin yang dimana kehidupan masyarakat nya cukup kurang. Kondisi sosial penerima program keluarga harapan di Desa Dakuta sebelum tersentuh program keluarga harapan menunjukkan keadaan yang masih jauh dari kehidupan yang layak. Khususnya di dalam hal pendidikan.

Kondisi umum penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dakuta terutama pada masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah kemiskinan. Salah satu warga penerima PKH di Desa Dakuta yaitu Ibu Yusra berusia 53 Tahun. Manfaat PKH selama ini telah membuat beban hidup penerima PKH lebih ringan, karena tidak lagi terlalu memikirkan biaya sekolah anak-anaknya dan kesehatan. Meskipun bantuan tersebut tidak bisa memenuhi semua kebutuhan sekolah, tetapi penerima PKH tetap bersyukur karena sudah mendapatkan bantuan uang secara cuma-cuma.

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi di masyarakat akibat keterbatasan kebutuhan individu. Namun, kemiskinan yang terjadi saat ini di daerah pedesaan adalah mereka atau keluarga mereka meneruskan kehidupannya pada waktu dan tempat tertentu. Jadi hubungan keduanya sama-sama buruk dalam masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan.

Kemiskinan merupakan sesuatu yang menjadi fokus upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dengan mengeluarkan kebijakan untuk berbagai program percepatan penanggulangan kemiskinan. Namun, penurunan angka kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi

masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Hal ini dikarenakan pemerintah kurang memiliki rasa keadilan. (Hendri et al, 2022)

Kemiskinan adalah suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang setiap individunya itu tidak terpenuhi yang namanya kebutuhan. Di dalam Islam kemiskinan dipandang bukan hanya dari sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebijakan ataupun kebutuhan dasar akan tetapi merupakan buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Karena salah satu konsep untuk memberantaskan dan mengentaskan kemiskinan adalah dengan bekerja keras dan berusaha.(Analia et al, 2023)

Kemiskinan dalam masyarakat merupakan suatu kondisi yang mencerminkan status kehidupan masyarakat, yang dapat dilihat dari taraf hidup masyarakat. Suatu keadaan dimana masyarakat seperti yang kita lihat terjadi di Indonesia yang mengharuskan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang merajalela namun pemerintah harus mampu menanggulangi kemiskinan tersebut dengan memberikan kebijakan atau program bagi masyarakat miskin agar angka kemiskinan di Indonesia berkurang karena masyarakat miskin pada dasarnya dibiayai oleh negara, sehingga pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menanggulangi kemiskinan. Hal ini dapat kita lihat dari perhatian nyata pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan Program Keluarga Harapan. Pemerintah Kabupaten Muara Batu berupaya menanggulangi kemiskinan atau keterbelakangan dengan melaksanakan program kesehatan masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada keluarga miskin (KM) dan keluarga penerima manfaat (KPM).(Husniar, 2023)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. dan program PKH ini sudah ada sejak tahun 2007 dengan tujuan untuk memberikan akses kesejahteraan sosial kepada anak-anak KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang duduk di bangku sekolah dasar, menengah, dan atas yang memanfaatkan lembaga pendidikan, serta lansia. Begitu pula PKH digunakan sebagai jaring pengaman sosial dengan memperluas cakupan, memperluas penerima manfaat, dan meningkatkan indeks kesejahteraan. Rencana ini akan berperan dalam meningkatkan konsumsi rumah tangga.(Sari, 2022)

Keluarga Harapan (PKH) merupakan program kesejahteraan keluarga yang memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin. PKH membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima manfaat PKH (sering disebut rumah tangga penerima manfaat). Permasalahan yang sering terjadi pada penerima bantuan adalah penyalahgunaan bantuan yang diberikan oleh penerima PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu. Program-program tersebut bertujuan untuk mengurangi masalah kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan. Program ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan utama di dalam pemerintahan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. permasalahan yang terjadi pada PKH ini kurang tepatnya sasaran dikarenakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS) tidak sesuai dilapangan. Jadi sangat tidak sesuai kriteria yang berdasarkan persyaratan. (Masrul et al, 2022)

Program Keluarga Harapan (PKH) ialah Upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dalam mengentaskan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan bahwa sebuah keluarga dikatakan miskin jika mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar baik berupa makanan dan bukan makanan, selain itu juga diukur dengan banyaknya pengeluaran selama sebulan, batas pengeluaran ini yang disebut dengan Garis Kemiskinan. (Fahim, 2019)

Program Keluarga Harapan (PKH) ini menerima bantuan dengan jumlah berbeda-beda sesuai dengan anggota keluarga atau komponen yang dimiliki. Dengan adanya menerima PKH diharapkan mendorong perubahan perilaku penerima PKH, bisa meningkatkan ekonomi, agar bisa menggunakan uangnya dengan baik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan bertujuan agar penerima program ini bisa melanjutkan taraf hidup yang lebih baik lagi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Dakuta, Kabupaten Aceh Utara khususnya masyarakat peserta PKH. Dalam islam juga dijelaskan dalam bentuk program pemberian bantuan sosial yang dinamakan dengan Ziswaf. (Rinaldi, 2022)

Program tersebut bertujuan untuk mengurangi masalah kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan. Dengan tujuan pengentasan kemiskinan, program ini merupakan penciptaan sistem perlindungan sosial yang dapat memudahkan dan membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) memperoleh akses pendidikan dasar dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan.

Program ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. (Masrul et al, 2022)

Kesejahteraan masyarakat adalah keadaan yang mencerminkan status kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari tingkat kehidupan masyarakat. Makna Kesejahteraan dalam ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara keseluruhan, termasuk kesejahteraan material, spiritual, dan moral. Doktrin ekonomi Islam mengutamakan kesejahteraan manusia. Ajaran Islam tentang rahmatan lil alamin mencakup konsep kesejahteraan. Namun, ada persyaratan untuk mendapatkan kesejahteraan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Jika orang mengikuti perintah dan menghindari perilaku terlarang, Allah SWT akan memberi mereka kemakmuran. (Masrul et al, 2022)

Kesejahteraan salah satu maksud dan tujuan bangsa yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia. Sejahtera merupakan dimana seseorang membutuhkan sesuatu yang sesuai dengan bakatnya untuk mencapai kemakmuran, yang dapat dipahami dengan kondisi yang sehat dan tenang. Sejahtera itu sendiri dapat diartikan keadaan yang sehat dan damai sehingga dapat mencapai kondisi tersebut, seseorang membutuhkan sesuatu usaha sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kesejahteraan masyarakat Desa Dakuta masih banyak belum sejahtera, seseorang dianggap belum sejahtera jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.

Kesejahteraan PKH tersebut kemudian oleh diperkuat Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 24 ayat 1 yang menyatakan

bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam rangka program percepatan dan perluasan sosial, pemerintah Indonesia pada tahun 2013 menyelenggarakan suatu program bantuan yang dimaksudkan untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sehingga dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan kemanusiaan yang bermartabat sebagai pelaksanaan amanat konstitusi bagi pemerintah pusat dan daerah. (Hidayah et al, 2023)

Implementasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ditinjau dari sisi perspektif Ekonomi Islam diantaranya berupa Keadilan, Tanggung Jawab dan Jaminan Sosial (Takaful) sebagai berikut : (Bulukumba, 2023)

#### 1. Keadilan

Islam memberikan pengajaran bahwa adil dapat dikerjakan disetiap waktu dan kesempatan. Berdirinya keadilan akan mengakibatkan terciptanya suatu aturan masyarakat yang selaras. Tidak hanya dibatasi dalam satu sudut pandang saja akan tetapi keadilan cakupan luas, seperti agama, masyarakat hukum dan lain sebagainya. Dalam surah An- Nahl ayat 90 menjelaskan perintah kepada manusia untuk berlaku adil. Hal ini senada dengan pendapat menurut tafsiran Ibnu Katsir, Allah menyuruh hambanya supaya bersikap adil yakni tidak membedakan-bedakan serta perintah melakukan kebaikan lainnya.

Sehingga jika ditinjau dari sisi keadilan masih terdapat peserta penerima bantuan PKH yang sudah dikategorikan sejahtera tetapi menerima program bantuan ini.

## 2. Tanggung Jawab

Sikap tanggung jawab harus melekat pada diri manusia baik ketika menjadi pelaku ekonomi ataupun tidak. Terlebih kepada seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin dalam suatu Negara, pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

## 3. Jaminan Sosial (Takaful)

Setiap Negara ditugaskan untuk menyediakan jaminan social dengan tujuan untuk menjaga kualitas hidup semua pribadi dalam islam.kebutuhan dasar dibagi menjadi dua yakni kebutuhan yang sifatnya individual meliputi sandang dan pangan, maupun yang sifatnya umum meliputi kesehatan, pendidikan dan rasa aman.

Salah satu Daerah yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan adalah Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Muara Batu tepatnya di Desa Dakuta. Desa Dakuta adalah suatu desa yang mata pencahariannya di sektor pertanian dan berdasarkan data dari BPS beberapa tahun ini angka kemiskinan di Aceh Utara mengalami kenaikan yang signifikan seperti terlihat pada table di bawah ini :

***Tabel 1.1***

***Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Utara***

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin (persen)</b>
2019	611, 435	819, 44	15, 32
2020	619, 407	814, 91	14, 99
2021	602, 793	834, 24	15, 33
2022	608, 106	806, 82	14, 64
2023	614, 640	806, 75	14, 45

Sumber : *Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh Utara*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 penduduk miskin mencapai 819, 44 ribu penduduk miskin atau 15, 32 persen, pada tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 814, 91 ribu penduduk dengan jumlah persen 14, 99. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin menjadi semakin meningkat yaitu 834, 24 atau 15, 33 persen dan pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin kembali menurun 806, 82 dengan persentase 14,64. Hal ini disebabkan karena harga barang dan kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai dari tahun 2019-2023 tercatat baik jumlah maupun persentase penduduk miskin mengalami penurunan kembali.

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Penerima KPM Kecamatan Muara Batu**

No.	Nama Desa	KPM
1.	Keude Mane	11
2..	Tanoh Anoe	76
3.	Cot Seurani	50
4.	Cot Trueng	70
5.	Dakuta	98
6.	Keude Bungkaih	57
7.	Kuala Dewa	60
8.	Mane Tunong	40
9.	Kambam	75
10.	Meunasah Aron	45
11.	Meunasah Baro	35
12.	Meunasah Drang	30
13.	Meunasah Lhok	40
14.	Meunasah Pinto	50
15.	Paloh Awe	70
16.	Paloh Raya	65
17.	Panigah	43
18.	Pante Gurah	80
19.	Pinto Makmur	68
20.	Reuleut Barat	50
21.	Reuleut Timur	45
22.	Teupin Banja	66

23.	Tumpok Berandang	74
24.	Ulee Madon	27
Jumlah		1300

*Sumber : Pendamping PKH Kecamatan Muara Batu (Data diolah)*

Pada Tabel di atas menunjukkan jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak 1300 Kartu Keluarga di Kecamatan Muara Batu dan satu Kartu Keluarga 1 orang penerima yang dihitung berdasarkan jumlah jiwa. Dari data tersebut terlihat bahwasanya Desa Dakuta merupakan desa yang paling banyak mendapatkan program keluarga harapan diantara 24 Desa tersebut. Dan menduduki peringkat pertama dari 24 (Dua puluh empat) desa yang ada di Kecamatan Muara Batu.

Desa Dakuta adalah salah satu Desa tertua di kecamatan Muara Batu, yang lahirnya sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Desa Dakuta adalah salah satu Desa dari 24 desa yang terletak di kemukiman bungkaih Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Dengan luas wilayah seluruhnya mencapai 200 Ha, dan jumlah penduduk sebanyak 600 Kartu Keluarga serta terdiri dari 4 Dusun. dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawah. Sebagai petani sawah masyarakat desa dakuta mengelola lahan pertanian dengan cara-cara bertani pada umumnya.

Bahwasanya kehidupan masyarakat petani tidak homogen, begitu juga kehidupan masyarakat petani di desa ini yang kehidupannya tergantung pada taraf kemampuan mereka dalam lahan pertanian yang biasanya dalam setahun 2 kali panen serta bekerja di sawah-sawah orang. Fakta sosial yang ditemukan dalam kehidupan petani di desa ini yaitu adanya sebahagian masyarakat masih belum terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. Keberadaan petani merupakan kekuatan

tersendiri bagi pembangunan sosial ekonomi serta merupakan tingkat level pekerjaan yang paling rendah. Jadi tidak dapat dimungkiri bahwasanya dari hal tersebut tidak dapat menutupi kemiskinan yang ada di desa dakuta, paling membantunya hanya sekedar 20% persen saja. Ternyata yang menjadi persoalannya itu adalah banyak masyarakat yang mata pencahariannya itu sebagai petani sawah bahwasanya yang mendapatkan bantuan program keluarga harapan sebanyak 98 kartu keluarga dengan jumlah 600 kartu keluarga yang berarti tidak bisa menutupi bahwasanya kemiskinan itu hilang dari desa dakuta. sehubungan dengan hal tersebut, maka program keluarga harapan dijadikan sebagai jaringan pengamanan sosial dengan memperluas cakupan, penerima dan peningkatan indeks mamfaat. Dan program ini memiliki peran terhadap peningkatan ekonomi dalam keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa program keluarga harapan memberikan dampak terhadap perubahan dalam rumah tangga. Maka dari itu dengan adanya bantuan program keluarga harapan ini masyarakat desa dakuta bisa membantu perekonomian dalam rumah tangga mereka.

Desa Dakuta ini adalah salah satu Desa yang mengalami tingkat kemiskinan (kesejahteraan) paling tinggi di antara 24 Desa tersebut. Berikut data jumlah penerima Program Keluarga Harapan di Desa Dakuta .

**Tabel 1. 3**  
**Jumlah Masyarakat Penerima PKH**  
**Desa Dakuta Kec. Muara Batu**

NO	Dusun	Penerima PKH ( Jiwa)
1	I	23
2	II	24
3	III	24
4	IV	27

Total		98
-------	--	----

Sumber : *Dokumentasi Desa Dakuta (Data diolah)*

Pada tabel di atas menunjukkan jumlah penerima Program Keluarga Harapan dalam satu Kartu Keluarga 1 orang penerima yang dihitung berdasarkan jumlah jiwa dan perdusun.

**Tabel 1.4**

**Jumlah peserta PKH di Desa Dakuta Tahun 2021-2024**

Peserta PKH (Tahun)	Jumlah Peserta PKH
2021	75
2022	82
2023	89
2024	98

Sumber : *Data Desa Dakuta (Data Diolah)*

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah peserta PKH dari tahun 2021-2024 mengalami peningkatan 7 dan 8 Orang yang tersebar di 4 dusun. Hal ini menunjukkan adanya penambahan KPM dari tahun ke tahun.

Sejak diluncurkan Kartu Keluarga Sejahtera yang sekarang diganti menjadi Program Keluarga Harapan pada tahun 2007 yang diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan yang ternyata mamfaat dari Program Keluarga Harapan mampu untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin, seperti yang terjadi di Desa Dakuta Kecamatan Muara Batu yang merupakan salah satu Desa yang mendapatkan bantuan pemerintah yaitu Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Menurut Ekonomi Syariah Tapi dalam Prakteknya yang terjadi di lapangan terdapat beberapa masalah yang tidak sesuai dengan yang seharusnya terutama

dalam hal pelaksanaan yaitu ketidaktepatan penerima Program Keluarga Harapan seperti salah sasaran pemberian PKH sehingga terjadinya perselisihan, keributan dan menganggap tidak adil dengan adanya dana ini.

Berdasarkan informasi awal yang penulis terima dari pendamping Program Keluarga Harapan Ibu Sukawati di Desa Dakuta yakni bahwasanya Program Keluarga Harapan ini benar sebuah program bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin akan tetapi penerapan dari Program Keluarga Harapan tersebut yang ada di Desa Dakuta jika ditinjau dari segi keadilan banyak masyarakat penerima Program Keluarga Harapan yang sudah sejahtera dalam hal ini mampu memenuhi kebutuhannya akan tetapi sebagai peserta penerima dana Program Keluarga Harapan yang sepatutnya untuk keluarga miskin. Keterlambatan cairnya dana bantuan Program Keluarga Harapan bagi sebahagian Keluarga Penerima Manfaat yang harusnya cair dengan penerima lainnya akan tetapi mengalami keterlambatan, total bantuan yang cair sudah jelas jelas nominalnya untuk setiap anggota dalam satu keluarga. Akan tetapi ini tidak seimbang dengan anggota penerima Program Keluarga Harapan (PKH). sehingga masih banyak masyarakat yang merasa kekurangan dan belum mendapatkan bantuan dana Program Keluarga Harapan, Sehingga dapat dipahami bahwa prinsip keadilan sendiri belum sepenuhnya terpenuhi dan dilihat dari jaminan sosial (takaful) penggunaan dana yang belum sebanding. Dan juga yang lebih Ironisnya lagi bahwasanya ada Kartu Keluarga di Desa Dakuta yang tergolong miskin tetapi tidak mendapat bantuan sosial apapun termasuk bantuan Program Keluarga Harapan ini.

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan menurut perspektif ekonomi syariah. Sehingga penelitian ini berjudul :

**“Analisis Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Masyarakat Desa Dakuta)”**

### **1.2 Fokus Masalah**

Adapun yang menjadi Fokus Masalah dalam Skripsi ini adalah :

1. Apakah pengentasan kemiskinan dapat terwujud melalui Program Keluarga Harapan di Desa Dakuta?
2. Apa Saja kendala yang terjadi Pada Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan di Desa Dakuta?
3. Apakah Pengentasan Kemiskinan dapat terwujud melalui Program Keluarga Harapan menurut Perspektif Ekonomi Syariah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan Skripsi atau karya ilmiah tentu mempunyai tujuan masing-masing demikian pula penulisan Skripsi ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk Mengetahui Apakah Pengentasan Kemiskinan dapat terwujud melalui Program Keluarga Harapan di Desa Dakuta.
2. Untuk Apa Saja Kendala yang terjadi pada pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan di Desa Dakuta.

3. Untuk Mengetahui Apakah Pengentasan Kemiskinan dapat terwujud Melalui Program Keluarga Harapan menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan Skripsi ini disamping mempunyai tujuan juga mempunyai manfaatnya juga. Adapun manfaat penelitian yang akan dilaksanakan dalam pembuatan Skripsi ini yaitu:

1. Bagi peneliti dan pembaca untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengentasan kemiskinan melalui program kartu keluarga sejahtera menurut ekonomi syariah di desa dakuta.

Bagi Masyarakat sebagai suatu sumber informasi bagi masyarakat bahwasanya program kartu keluarga sejahtera dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan.